

**HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM
INDONESIA**



**Nama : Eben Ezer Victor
NIM : 1810611325**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2023**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Eben Ezer Victor

NPM : 1810611325

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul : Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta.

Ketua

(Heru Suyanto, S.H., M.H.)

Anggota 1

(Rosalia Dika A, S.H., M.H.)

Dekan

(Dr. Abdul Halim, M.Ag)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 19 Januari 2023



Anggota 2

(Dr. Slamet Triwahyudi S.H., M.H.)

Kaprodi

(Taupiqqurrahman S.H., M.Kn.)

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL :
HAK IMUNITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

EBEN EZER VICTOR
1810611325

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta

Jakarta, 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Hukum



Taupiqqurrahman, S.H.,M.Kn
NIP.198701022019031006

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Slamet Triwahyudi, SH, MH.
NIK. 486011310391

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Eben Ezer Victor
Nim : 1810611325
Tanggal : 10 Februari 2023

Jakarta, 10 Februari 2023
Yang menyatakan,



Eben Ezer Victor
1810611325

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nam : Eben Ezer Victor
Nim : 1810611325
Fakultas : Hukum
Program : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasionalterakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 10 Februari 2023
Yang menyatakan,



Eben Ezer Victor

Abstrak

Hak Imunitas saat ini menjadi masalah klarifikasi publik, dalam hal hak istimewa, khususnya ketika seseorang menikmati kekebalan sebagaimana ditentukan oleh hukum dalam menjalankan fungsinya. Pelaksanaan pembebasan bagi anggota DPR-RI masih tergolong lemah dan masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya problematika pengaturan hak imunitas Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengaturan Hukum Indonesia masih belum maksimal dan pengaturan Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Hukum Indonesia dalam perspektif *equality before the law* mendapatkan pro dan kontra. Dalam menjalankan fungsi dan tugas DPR ditemukan bahwa atas nama keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 245 yang tertuang dalam Pasal 20A ayat (3) yang mengatur tentang tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberi Hak Imunitas oleh Konstitusi dan harus diberikan batasan yang tegas.

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah yang bersumber dari beberapa referensi dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Sistem Hukum Indonesia dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Pejabat Dewan Perwakilan Rakyat.

Namun demikian harus tetap dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi *abuse of power* terkait hal ini maka penting untuk membatasi kemampuan anggota DPR dalam melaksanakan peran perwakilannya. Ketika hak imunitas tersebut disalah gunakan oleh para pejabat Dewan perwakilan Rakyat maka pejabat Dewan perwakilan Rakyat bebas dari yurisdiksi, tetapi pejabat Dewan perwakilan Rakyat tidak sepenuhnya bebas dari yurisdiksi karena perbuatan-perbuatan yang diluar tugas resminya dapat diadili sesuai dengan yurisdiksi hukum nasional dan dapat dibawa ke hadapan pengadilan. Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2018 terkait anggota Dewan Perwakilan Rakyat belum diatur secara tegas untuk tugas aparat penyidik Kepolisian, Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan kepada anggota Dewan. Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 itu harus ditulis secara tegas daripada hak dari Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan.

Abstract

Right to Immunity is currently a matter of public clarification, in terms of privileges, especially when a person enjoys immunity as provided for by law in carrying out his functions. The implementation of the release for members of the DPR-RI is still relatively weak and there are still a number of problems including the problem of setting the DPR's immunity rights in Indonesian law arrangements which are still not optimal and the regulation of the DPR's immunity rights in the Indonesian legal system in the perspective of equality before the law getting pros and cons. counter. In carrying out the functions and duties of the DPR, it was found that in the name of the privileges granted by the 1945 Constitution Article 245 as stipulated in Article 20A paragraph (3) which regulates the duties of members of the DPR are given the Right of Immunity by the Constitution and must be given strict limits.

The research used is normative juridical, namely legal research conducted based on norms and rules originating from several references and laws and regulations related to the Indonesian legal system in solving problems carried out by officials of the House of Representatives.

However, it must remain within the corridor of applicable statutory provisions so that abuse of power does not occur in this regard. It is therefore important to limit the ability of DPR members to carry out their representative roles. When the right of immunity is abused by officials of the People's Representative Council, the DPR officials are free from jurisdiction, but DPR officials are not completely free from jurisdiction because acts that are outside of their official duties can be tried in accordance with the jurisdiction of national law and can be brought to justice. before the court. In Law number 2 of 2018 regarding members of the People's Legislative Assembly it has not been explicitly regulated for the duties of police investigators, the Corruption Eradication Commission (KPK), and the Attorney General's Office in conducting examinations of members of the Council. In Law number 2 of 2018 it must be written explicitly from the rights of the Police, the Corruption Eradication Commission and the Attorney General's Office.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul “HAK IMUNITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM DIINDONESIA”. Tujuan dari penulisan skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir oleh penulis yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi terdapat kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Slamet Triwahyudi S.H, M.H selaku pembimbing yang telah sabar dan tulus meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi. Semoga Tuhan membalas dengan kebaikan dan kasih sayang kepada beliau. Aamiin. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi. Sehingga dengan rendah hati dan rasa hormat penulis ingin menyampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA.Com. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Ibu Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Bapak H. Heru Suyanto, S.H, M.H, C.L.A selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Bapak Taupiqurrahman, S.H, M.KN selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Bapak Andriyanto Adhi Nugroho, SH, MH selaku Pembimbing Akademik Penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

9. Orang tua penulis Ibu Irwani Lubis yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan mendidik penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.
10. Kepada Letnan Kolonel Marupa Sihombing, S.H., M.H. yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan mendidik penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca.

Jakarta, 3 Januari 2023

Eben Ezer Victor

DAFTAR ISI

LEMBARPERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Literatur Review.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum Indonesia.....	11
C. Tinjauan Umum Tentang Dewan Perwakilan Rakyat	16
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	21
A. Alternatif Sistem Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara Pembatasan Aktivitas.....	21
B. Analisis Pembatasan Aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat yang melakukan tindak Pidana Perspektif Hukum Indonesia.....	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Problematika pengaturan Hak Imunitas Dewan Perwakilan Rakyat dalam perspektif Hukum Indonesia	29
B. Pengaturan Hak Imunitas DPR Sistem Hukum Indonesia dalam Perspektif Equality Before The Law.....	34

BAB V PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41

